



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENCEP DUDI GINANJAR**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **123490**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.871.804.750**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/160 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 468.562.500
2. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/56 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.019.812.500
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.432 m2/500 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.342.812.500
4. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/54 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 165.375.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/76 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 303.187.500
6. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 248.724.000
7. Tanah Seluas 2.005 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 574.733.250
8. Tanah Seluas 1.022 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 563.377.500
9. Tanah Seluas 336 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 185.220.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 349.750.000**



1. MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.750.000
2. MOBIL, CHEVROLET TRAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOBIL, HYUNDAI CRETA PRIME 1.5 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.402.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.113.549.786
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.737.104.536
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.737.104.536

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.